

Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

ABSTRAK

Pemerintahan berbasis elektronik atau E-Government merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi kebijakan e-government di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Implementasi E-Government dapat mempercepat proses administrasi dan memudahkan akses bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi, faktor pendukung, penghambat Implementasi Kebijakan E-government dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan Implementasi E-government serta solusi terhadap penghambat Implementasi Kebijakan E-Government yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini ada 12 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kepala Bidang, staf, akademisi, mahasiswa dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan E-Government di Kabupaten Sinjai telah terlaksana. Implementasi kebijakan E-Government ini mengacu pada teori Edwar III yang meliputi beberapa indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Implementasi Kebijakan ini dapat dilihat dengan penerapan E-Government seperti Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Perizinan Online SIMPELMI, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Elektronik. Implementasi Kebijakan E-government dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dukungan politik/pemerintah, teknologi yang mendukung, akses jaringan Sumber daya Manusia yang terlatih. Adapun faktor penghambatnya berupa akses jaringan yang tidak mendukung, infrastruktur, resistensi perubahan, kesadaran masyarakat dan regulasi.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, E-government*